

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus pada permasalahan konflik yang terjadi di Pancoran Buntu II antar kelompok yang dibalut oleh isu persengketaan tanah. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain adalah kejanggalan hukum, pelanggaran HAM, serta keberpihakan pemerintah daerah setempat kepada pihak penggusur.

Dalam memperoleh data-data untuk penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan para informan yang terlibat, serta dokumen-dokumen terkait konflik Pancoran Buntu II.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pada fase potensi konflik dimulai dengan adanya tindakan sosialisasi serta intimidasi oleh PT Pertamina melalui PT PTC dengan oknum terhadap warga tanpa informasi sebelumnya. Pada fase pertumbuhan konflik, muncul empati dari pihak-pihak dengan dilakukannya edukasi hukum. Kemudian, pada fase pemicu dan eskalasi konflik, terdapat puncak masalah dimana menjadikan bentrok serta demo oleh warga dan solidaritas sebagai puncaknya. Terakhir, pada fase pasca konflik, pemerintah daerah setempat memiliki komitmen dalam membantu warga memperoleh hak dasar atas kasus Pancoran Buntu II yang belum kunjung selesai. Sehingga, manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mediasi terkait persengketaan tanah dan komitmen dalam akomodasi terkait dampak konflik terhadap warga Pancoran Buntu II.

Simpulan yang dapat ditarik adalah belum ada kepastian hukum dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap warga sehingga ada potensi bahwa eskalasi akan muncul kembali.

**Kata Kunci:** Konflik kelompok, Fase konflik, Sengketa tanah Pancoran Buntu II.

## **ABSTRACT**

*This research focuses on the conflict problems that occurred in Pancoran Buntu II between groups that were covered by the issue of land disputes. In this case, the problems that arose were motivated by various factors, including legal irregularities, human rights violations, and the local government's partiality towards eviction.*

*In obtaining data for research, qualitative research methods were used with a case study approach to explain certain cases. The data were obtained through field observations, interviews with the informants involved, and documents related to the Pancoran Buntu II conflict.*

*Based on the results of field research, the potential conflict phase begins with acts of socialization and intimidation by PT Pertamina through PT PTC, with elements against residents without prior information. During the growth phase of the conflict, empathy emerged from parties through legal education. Then, during the conflict-triggering and escalating phases, there was a peak in the problem, which led to clashes and demonstrations by residents and solidarity. Finally, in the post-conflict phase, the local government was committed to helping residents obtain basic rights over the unfinished Pancoran Buntu II case. Therefore, the conflict management carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta is mediated by land disputes and commitments in accommodation related to the impact of the conflict on the residents of Pancoran Buntu II.*

*The conclusion that can be drawn is that there is no legal protection from the Provincial Government of DKI Jakarta for residents, so there is a potential for an escalation to reappear.*

**Keywords:** *Group conflict, Conflict phases, Pancoran Buntu II land dispute.*